

**LAPORAN SINGKAT**  
**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI**  
**DENGAN**  
**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**SENIN, 29 JANUARI 2007**

---

Tahun Sidang : 2006-2007  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke : --  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI  
Dengan : Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Hari/Tanggal : **Senin, 29 Januari 2007**  
Pukul : 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi II (KK.III)  
Ketua Rapat : E.E. Mangindaan, S.IP/Ketua Komisi II DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Suroso, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI  
Acara : 1. Langkah dan strategi dalam peningkatan pelayanan dan pelaksanaan sertifikasi tanah, pemetaan serta penguatan hak-hak rakyat atas tanah;  
2. Proses pembaruan agraria dan penyelarasan antara kepentingan pembangunan dan ketaatan asas yang berkaitan dengan investasi dan akses masyarakat terhadap pertanahan ;  
3. Penyelesaian penyempurnaan UUPA;  
4. Penyelesaian masalah-masalah pertanahan nasional dan;  
5. Masalah aktual lainnya.  
Hadir : 35 Anggota dari 49 Anggota Komisi II DPR RI  
Izin : 13 Anggota Komisi II DPR RI

**HADIR :**

♦E.E. Mangindaan, S.IP, ♦Drs. H. Priyo Budi Santoso, ♦Ir. Sayuti Asyathri, ♦Dra. Hj. Ida Fauziyah, ♦Drs. H.A. Mudjib Rochmat, ♦Drs. H. Sulaiman Effendi, ♦Drs. Made Suwendha, ♦H. Andiwahab DT. Majokayo, SM,HK, ♦Ferry Mursyidan Baldan, ♦H. Abdul Nurhaman, S.IP, S.Sos, M.Si, ♦Ny. Hj. Nurhayati Yasin Limpo ♦Prof. Drs. H. Rustam E. Tamburaka, ♦ Victor Bungtilu Laiskodat, SH . ♦ Dra. Eddy Mihati,M.Si, ♦Hj. Tumbu Saraswati, ♦Alexander Litaay♦Drs. Agustinus Clarus, ♦Drs. Soewarno, ♦Drs. H. A. Chozin Chumaidy, ♦H. Romzi Nihan, S.IP,. ♦Drs. H. Sofyan Ali, MM, ♦H. Chufuran Hamal, SH, MKn, ♦Ignatius Mulyono, ♦Drs. Barnstein Samuel Tundan, ♦H. Hermansyah Nazirun, SH, ♦Ir. Hj.Andi Yuliani Paris, M.Sc. ♦H.M. Khaidir M. Wafa, MA, ♦Tony Wardoyo,. ♦H. Jazuli Juwaini. Lc. ♦Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si,. ♦Agus Purnomo, S.IP, ♦Prof. DR. Ryaas Rasyid, MA. ♦Jamaluddin Karim, SH, ♦Anhar, SE, ♦Pastor Saut M. Hasibuan.

## **IZIN :**

♦H. Fachruddin, ♦DR. H. Abdul Gafur, ♦Drs. Agus Condro Prayitno, ♦Drs. Ben Vincent Djeharu, MM, ♦Ir. Sutjipto, ♦Suryana, ♦TGK. H. Muhammad Yus, ♦Dra. Lena Maryana Mukti, ♦H. Suharso Monoarfa, ♦Drs. H.A.M. Fatwa, ♦Hj. Nidalia Djohansyah Makki, ♦Drs. H. Saifullah Ma'shum, M.Si, ♦M. Nasir Jamil, S.Ag

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dibuka pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. E.E. Mangindaan, S.IP

## **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

- A. Langkah dan Strategi yang diambil oleh BPN dalam penyesuaian antara kepentingan pembangunan dan ketaatan asas yang berkaitan dengan investasi serta akses masyarakat terhadap pertanahan.
- B. Strategi dan kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh BPN terhadap penyelesaian permasalahan tanah-tanah yang merupakan tanah hak ulayat yang dikuasai oleh investor dan sering menimbulkan konflik di masyarakat begitu juga dengan sengketa tanah masyarakat yang melibatkan pihak-pihak seperti TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Kepolisian RI.
- C. Langkah dan strategi BPN dalam peningkatan pelayanan dan pelaksanaan sertifikasi tanah, pemetaan tanah serta kemajuan penyelesaian pendaftaran tanah dan penetapan hak atas tanah.
- D. Jumlah sertifikat tanah telah diterbitkan dari Prona sampai tahun 2006 yang dialokasikan 3.944.910 persil terealisasi sebanyak 3.516.613 persil dan jumlah tenaga ukur sampai saat ini sejumlah 2806 orang dan idealnya jumlah tenaga ukur jika dikaitkan dengan jumlah dan luas bidang tanah sampai dengan tahun 2009 diperlukan penambahan 3194 orang sehingga untuk penyelesaian target pengukuran tanah  $\pm$  3 juta bidang tanah sebanyak 6000 juru ukur. Jumlah uang negara dari perolehan BPHTB sebesar 5% pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan sedangkan BPN ikut berperan mengontrol dokumen dalam setiap pengurusan penerbitan sertifikat untuk memenuhi pembayar BPHTB.
- E. Sasaran dari pelaksanaan dan tolak ukur pencapaian program Gerakan Pembaharuan Agraria Nasional yang merupakan gerakan terpadu antar berbagai program yang akan merestrukturisasi penggunaan, pemanfaatan penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- F. Mengenai penyiapan RUU Perubahan UUPA, sebagai hasil dari Konsultasi Publik, konsultasi dengan Pimpinan DPR RI dipandang perlu Undang-undang dalam kerangka UUPA tanpa melakukan pembahasan UUPA itu sendiri dengan kesepakatan bahwa materi muatan yang sudah dikonsultasikan menjadi bagian dari isi Undang-undang yang akan diusulkan tersebut. BPN dalam program kegiatannya merencanakan penyusunan RUU Hak Atas Tanah, RUU Pendaftaran Tanah, RUU Pendaftaran HGRAT, HGRBT, RUU Kadastral Kelautan dan beberapa Rancangan Peraturan Perundang-undangan, untuk terjaminnya kepastian hukum Hak-hak Tanah.

### III. PENUTUP / KESIMPULAN

Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional menyampaikan penjelasannya dan memberikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi II DPR-RI, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Komisi II DPR-RI memberikan apresiasi kepada Kepala BPN yang telah menyiapkan Renstra BPN 2007-2009 dengan menetapkan 11 (sebelas) agenda kebijakan di Bidang Pertanahan, dan Komisi II DPR-RI meminta kepada Kepala BPN untuk menjabarkan implementasinya termasuk sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat dan memprioritaskan pelaksanaan percepatan pemetaan, pendaftaran tanah, dan penguatan hak atas tanah melalui program pensertifikatan 9 juta bidang tanah dengan biaya murah, bebas pajak/BPHTB, serta melalui program PRONA, dan hasilnya secara periodik dilaporkan dan dibahas dengan Komisi II DPR-RI.
2. Dalam kerangka kepastian hukum mengenai hak atas tanah, Komisi II DPR-RI mendukung dilakukannya penataan organisasi dengan penyempurnaan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOPP), untuk itu diharapkan kepada BPN untuk melakukan sosialisasi.
3. Komisi II DPR-RI mendukung Program Pembaharuan Agraria Nasional yang akan dimulai pada tahun 2007 dan diharapkan selesai pada tahun 2013 yang pelaksanaannya perlu disiapkan secara hati-hati dan matang dan didukung oleh kelembagaan yang tangguh dengan menetapkan blue print yang berangkat dan menitikberatkan pada pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, dan biaya yang murah, untuk itu Komisi II DPR-RI meminta kepada Kepala BPN untuk mengevaluasi dan mengendalikan langsung aparat BPN dari Deputi sampai tingkat bawah agar agenda kebijakan dan strategis BPN untuk melakukan Program Pembaharuan Agraria Nasional tersebut berjalan dengan baik.
4. Dalam rangka penyediaan blanko yang berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah, Komisi II DPR-RI meminta kepada BPN agar pengadaan blanko harus dilakukan secara transparan dengan memperhatikan ketepatan jumlah kebutuhan blanko dan menghindari keterlambatan distribusinya, sehingga dimasa mendatang tidak terjadi kelangkaan blanko di daerah-daerah.
5. Komisi II DPR-RI meminta kepada Kepala BPN untuk menetapkan jangka waktu penyelesaian setiap penanganan kasus/konflik pertanahan dan melalui Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR-RI secara khusus mengikuti proses penyelesaian kasus pertanahan yang dilakukan oleh BPN diseluruh tanah air.
6. Untuk memberikan pelayanan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang mudah dan murah kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, Komisi II DPR-RI mendukung Kepala BPN untuk penambahan Juru Ukur yang diperlukan sampai dengan tahun 2009 sesuai dengan kebutuhan BPN.

#### Catatan.

1. Komisi II DPR-RI mendukung dilakukannya penyusunan RUU Hak Atas Tanah, RUU Pendaftaran Tanah, RUU Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas Tanah/Hak Guna Ruang Bawah Tanah, RUU Kadastral Kelautan untuk diusulkan melalui Badan Legislasi DPR-RI untuk diagendakan pada Tahun 2007 sesuai prioritas.
2. Mengingat strategis dan kompleksitasnya permasalahan dibidang pertanahan yang menyangkut berbagai aspek antara lain : ekonomi, sosial, politik, hukum dll, perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh penguatan dan peningkatan organisasi, fungsi, tugas dan tanggungjawab BPN sesuai dengan amanat TAP MPR No.IX Tahun 2001 dan TAP MPR No.V Tahun 2003.

Rapat diakhiri pukul 13.00 WIB.

**Jakarta, 29 Januari 2007**  
**PIMPINAN KOMISI II DPR RI**  
**KETUA,**

**E.E. MANGINDAAN, S.IP**  
**A-128**

- G. Langkah dan Strategi yang diambil oleh BPN dalam penyelarasan antara kepentingan pembangunan dan ketaatan asas yang berkaitan dengan investasi serta akses masyarakat terhadap pertanahan.
1. Menyusun UU Pertanahan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi semua orang dalam menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan tanah.
  2. Peraturan yang ada sebenarnya telah memberikan peluang yang baik kepada investor (HGU, HGB, Hak Pakai), dan hukum tanah yang sudah ada cukup memberikan peluang hukum antara investasi dengan tetap menjaga akses masyarakat.
  3. Penguatan hak rakyat atas tanah dan refoma agraria
- H. Strategi dan kebijakan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh BPN terhadap penyelesaian permasalahan tanah-tanah yang merupakan tanah hak ulayat yang dikuasai oleh investor dan sering menimbulkan konflik di masyarakat begitu juga dengan sengketa tanah masyarakat yang melibatkan pihak-pihak seperti TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Kepolisian RI.
1. Restrukturisasi Organisasi, antara lain dengan membentuk ke deputian baru yaitu Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik.
  2. Penguatan SDM, membentuk PPNS, Sistem loket pelayanan pengaduan sengketa, konflik dan perkara pertanahan di BPN Pusat, Kanwil BPN Provinsi maupun Kakan pertanahan Kab/Kota
  3. Membangun dan membakukan mekanisme penanganan sengketa di seluruh Indonesia